

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, maka muncul tuntutan bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian laporan keuangannya. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan keuangan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Sedangkan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Perhatian terhadap isu transparansi dan akuntabilitas keuangan publik semakin meningkat manakala kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun. Sebagai salah satu konsekuensinya, Pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan secara relevan, jujur, dan terbuka kepada publik.

Penyajian laporan keuangan yang berkualitas, dalam hal ini yang memenuhi kriteria standar akuntansi pemerintah merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah. Selain untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada jalannya pemerintahan, hal ini juga dikarenakan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab kepada masyarakat untuk mempertanggungjawabkan kegiatan pemerintahan yang telah dilaksanakan, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

Namun untuk menjaga kualitas laporan keuangan bukanlah hal yang mudah, karena terdapat beberapa hambatan dalam menyajikannya. Sejumlah artikel melaporkan rendahnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Berita-berita itu menyiratkan buruknya pengelolaan keuangan pada tingkat daerah yang terfokus pada tiga hal. Pertama, tersendat-sendatnya pengajuan anggaran. Kedua, rendahnya daya serap anggaran. Ketiga, kelambatan lembaga-lembaga

pemerintah di pusat dan daerah melaporkan keuangan secara tepat waktu sesuai standar akuntansi pemerintah. (Bandungnews.com)

Selain itu opini atas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung adalah wajar dengan pengecualian. Dimana dalam catatannya, BPK menemukan dana Rp 1,1 triliun di Pemkot Bandung yang bermasalah, sebagian besar menyangkut aset daerah yang belum terdata dengan baik. (Pikiran Rakyat, 30 April 2010)

Pengelolaan barang daerah yang buruk tergambar dari beberapa kasus yang terjadi di Kota Bandung. Kasus pertama yaitu mengenai 50% kendaraan dinas yang akan dilepas oleh Pemerintah Kota Bandung “menghilang” atau bisa dikatakan keberadaannya tidak jelas. Sebanyak 250 kendaraan itu sebagian besar sudah berada di tangan orang-orang yang sudah tidak lagi menjabat. Banyaknya kendaraan dinas yang tidak jelas keberadaannya, itu merupakan bukti buruknya pengelolaan aset oleh Pemerintah Kota Bandung. (bandungwebs.com)

Kasus lainnya yaitu kasus sengketa lahan di kawasan Gasibu. Perkara sengketa klaim tanah ini bermula dari gugatan Eutik Suhanah dan 5 penggugat lainnya ke PTUN Bandung tahun 2007. Mereka mengaku sebagai ahli waris Patinggi alias Djayareksa alias Rd Kusuma Atmawijaya yang mereka klaim memiliki tanah di kawasan Gasibu. Padahal selama bertahun-tahun lahan gasibu ini diakui sebagai asset daerah Kota Bandung. Bertindak sebagai pemohon adalah Eutik Suhana Cs dan sebagai termohon Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandung Cs. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali Eutik Suhanah Cs atas sengketa lahan di kawasan Gasibu, Bandung. Putusan MA sama dengan putusan PTUN di tingkat pertama, yakni Eutik sebagai pemilik sah lahan

lapangan Gasibu. Putusan MA ini dikeluarkan pada Selasa 15 September 2009 lalu dengan nomor perkara 35 PK/TUN/2009. (Tempointeraktif.com)

Banyaknya perkara-perkara seperti di atas sangat jelas menggambarkan lemahnya pengelolaan barang milik daerah. Pemerintah akhirnya harus kehilangan asset yang berharga karena kurang jeli dalam mengelola assetnya. Buruknya pengelolaan asset ini akhirnya menjadi penyebab buruknya pula laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung. Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah perlu menyiapkan pengelolaan/manajemen barang daerah secara professional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif dalam setiap tahap pengelolaannya. Peraturan mengenai pengelolaan/manajemen barang daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

Dalam Permendagri No. 17 Tahun 2007 diuraikan secara lengkap mengenai pengelolaan barang daerah yang baik. Pengelolaan barang milik daerah menurut Permendagri ini memiliki beberapa siklus penting yang meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran.
2. Pengadaan.
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran.
4. Penggunaan.
5. Penatausahaan.
6. Pemanfaatan.
7. Pengamanan dan pemeliharaan.
8. Penilaian.
9. Penghapusan.
10. Pemindahtanganan.
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
12. Pembiayaan.
13. Tuntutan ganti rugi.

Manajemen Barang Daerah dapat dilakukan dengan menjalankan siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan Permendagri No.17 Tahun 2007 tersebut sehingga tercipta suatu manajemen barang daerah yang lebih baik lagi. Manajemen aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Manajemen Keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan. Manajemen aset ke depan lebih ditujukan untuk menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintahan daerah, maka dituntut agar dapat mengembangkan atau mengoptimalkan manajemen barang/aset daerah.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan pengaruh manajemen barang daerah terhadap kualitas laporan keuangan, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini,

Tabel 1.1
Penelitian Yang Relevan

Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Dora Detisa	2008	Hubungan Pengelolaan Aset Daerah Dengan Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong	Sebesar 41,3% kualitas laporan keuangan ditentukan oleh pengelolaan aset daerah. Sisanya 58,7% ditentukan oleh faktor lain.	Mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007	Hanya meneliti 7 siklus yaitu dari tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran sampai tahap pengamanan dan pemeliharaan
Totok Supriono	2008	Hubungan Manajemen Aset Dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Klaten.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara Manajemen Aset dengan Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Klaten.	dan PP Nomor 24 Tahun 2005	Tidak menghitung koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh X terhadap Y

Dari penelitian yang dilakukan oleh Dora Detisa dan Totok Supriono, terlihat bahwa kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh manajemen barang daerah yang bersangkutan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini lebih menekankan pada pengaruh manajemen barang daerah terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintahan Kota Bandung. Seperti dipaparkan dalam pernyataan-pernyataan di atas, pengelolaan aset daerah telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh banyak daerah termasuk Pemerintah Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung sendiri termasuk ke dalam daerah yang kurang baik laporan keuangannya. Hal ini didasarkan pada laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung tahun 2008. Salah satu temuan yang kemudian juga diindikasikan berpotensi menimbulkan kerugian adalah buruknya manajemen aset daerah. Inilah yang menjadi alasan mengapa peneliti memilih untuk melakukan penelitian terhadap Pemerintah Kota Bandung terkait pengaruh penerapan manajemen barang daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

Pemerintah daerah memerlukan sebuah sistem pengelolaan aset yang dapat dipertanggungjawabkan. Manajemen aset adalah metode yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya. Untuk mencapai tujuan pengelolaan aset secara terencana, terintegrasi, dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki dalam tempo yang singkat, dibutuhkan suatu sarana yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan atas aset.

Berdasarkan uraian di atas, penting rasanya mengetahui sejauh mana manajemen barang daerah dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Karena dengan mengetahui pengaruhnya, dapat dijadikan acuan bagaimana pengelolaan barang milik daerah yang tepat dan harus dilakukan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH MANAJEMEN BARANG DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN” (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang timbul yaitu :

1. Bagaimana manajemen barang daerah di Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh manajemen barang daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Pemerintah Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai pengaruh manajemen barang daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Pemerintah Kota Bandung.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai :

1. Manajemen barang daerah di Pemerintah Kota Bandung.
2. Kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung.
3. Besarnya pengaruh manajemen barang daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Pemerintah Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan baik dalam hal penelitian maupun obyek penelitian, yang dalam hal ini adalah pengaruh manajemen barang daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2. Kegunaan Empiris

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pengaruh manajemen barang daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sejauh mana manajemen barang daerah dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga dari sini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam menentukan kebijakan dan arah kerja demi tercapainya kualitas laporan keuangan daerah yang baik.